

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan Anwar Sanusi (2011: 13).

3.2 Obyek Penelitian

Menurut Anwar Sanusi (2011: 15) bahwa “kriteria objektif dalam metode ilmiah menghendaki bahwa segala fenomena yang ditangkap oleh indrawi kemudian diamati dan dianalisis harus berlangsung secara objektif”.

Objek penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015-2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber internal. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 149)

“Data internal adalah dokumen – dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan dalam suatu organisasi. Sumber data penelitian ini adalah data internal karena peneliti memperoleh data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.

3.3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data ini secara tidak langsung di dapatkan dari sumber asli (melalui media perantara). Yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang pada periode tahun anggaran 2015-2017.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Identifikasi variabel

Jonathan Sarwono (2006: 53) menjelaskan variabel adalah sesuatu yang berbeda atau bervariasi. Variabel ini dibedakan menjadi variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel tergantung (*dependent variabel*) variabel yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015-2017, dengan indikator berikut:

- a. Rasio Kemandirian
- b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
- c. Rasio Efektivitas PAD

- d. Rasio Efisiensi
- e. Rasio Keserasian Belanja

3.4.2 Definisi Konseptual Variabel

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Halim (2012).

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. (Mahmudi 2010).

c. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143).

d. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan diterima. Mahmudi (2010).

e. Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja ini menggambarkan bagaimana daerah memprioritaskan alokasi dananya pada pembelian rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Mahmudi (2010).

3.5.3 Definisi Operasional Variabel

a. Rasio Kemandirian

Halim (2012), Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan Daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah Daerah

dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Halim (2012), Rasio Efektifitas PAD merupakan gambaran kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah. dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio penerimaan PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitas sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien.

d. Rasio Efisiensi

Mahmudi (2010), Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

e. Rasio Keserasian Belanja

Dalam Mahmudi (2010), Analisis Rasio Keserasian Belanja ini menggambarkan bagaimana daerah memprioritaskan alokasi dananya pada pembelian rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} \\ &= \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \\ &\text{Rasio Belanja Langsung terhadap APBD} \\ &= \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain sebagainya.

Dalam hal ini dokumen yang dimaksud adalah segala dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2017.

3.6 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
3. Rasio Efektivitas PAD
4. Rasio Efisiensi
5. Rasio Keserasian Belanja